

TESIS
PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMERINTAH DAERAH DALAM
MENINDAKLANJUTI REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT

*Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Hukum*



Disusun Oleh :

STEFFI ZAFIA FUROAN, S.H.
NIM 2120112023

Pembimbing :

Prof. Dr. KURNIA WARMAN, S.H., M.Hum.
Dr. HENGKI ANDORA, S.H., LL.M

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

**PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMERINTAH DAERAH DALAM
MENINDAKLANJUTI REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

*Steffi Zafia Furqan, 2120112023, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Andalas, Tahun 2023*

ABSTRAK

Pengelolaan kekayaan negara diatur di dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 23D Undang-Undang 1945. Pengaturan keuangan negara tidak lepas dari tanggung jawab pemeriksaan BPK sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah menghasilkan temuan yang harus ditindaklanjuti berdasarkan rekomendasi BPK. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada tahun anggaran 2020-2021 terdapat beberapa temuan dengan total kerugian sebanyak Rp.1,2 Triliun. Tentu saja ini menimbulkan kewajiban bagi pejabat daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK berdasarkan temuan yang ada dengan melengkapi dokumen tindak lanjut. Maka dari itu, penelitian difokuskan pada tiga permasalahan. *Pertama*, Bagaimana pertanggungjawaban pejabat pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Provinsi Sumatera Barat. *Kedua*, Mengapa sebagian pejabat pemerintah daerah tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Provinsi Sumatera Barat. *Ketiga*, Bagaimana pemberian sanksi terhadap pejabat pemerintah daerah yang tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan tahun 2020-2021 masih menggambarkan sangat minimnya tanggung jawab pejabat pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK Provinsi Sumatera Barat. Hal itu disebabkan kurangnya respon keaktifan dari pejabat pemerintah daerah sehingga masih banyaknya dokumen tindak lanjut yang belum dilengkapi dan kurangnya komitmen untuk kerja sama antara pejabat BPK dengan pejabat pemerintah daerah yang berwenang untuk menyelesaikan rekomendasi BPK. Pemberian sanksi yang diberikan kepada pejabat pemerintah daerah yang tidak menindaklanjuti rekomendasi BPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana yaitu berupa teguran tertulis, pemberhentian dengan hormat, penundaan kenaikan pangkat selama 1 Tahun dan penundaan kenaikan gaji selama 1 Tahun serta dapat dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apabila tidak menjalankan kewajiban untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

Kata Kunci : ***Pertanggungjawaban, Pejabat Pemerintah Daerah, Tindak Lanjut, Rekomendasi***

**ACCOUNTABILITY OF LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS IN
FOLLOWING UP ON THE RECOMMENDATIONS THE AUDIT BOARD OF
WEST SUMATRA PROVINCE**

*Steffi Zafia Furqan, 2120112023, Master Of Law Study Program, Faculty Of Law,
Andalas University, 2023*

ABSTRACT

The management of state property is regulated in Article 23 to Article 23d of the 1945 law. State financial regulation can not be separated from the audit responsibilities of the CPC as described in Law No. 15 of 2004 on the audit of State Financial Management and responsibility. The audit conducted by BPK on the financial statements prepared by local governments resulted in findings that must be followed up based on the recommendations of BPK. Based on the results of the BPK examination in the 2020-2021 fiscal year, there were several findings with a total loss of Rp.1.2 trillion. Of course, this creates an obligation for local officials to follow up on BPK recommendations based on existing findings by completing follow-up documents. Therefore, the study focused on three problems. First, How is the accountability of local government officials in following up on the recommendations of the BPK examination results of West Sumatra province. Second, why some local government officials do not follow up on the recommendations of the BPK examination results of West Sumatra province. Third, how to sanction local government officials who do not follow up on the recommendations of the BPK examination results of West Sumatra province. This study uses empirical juridical research methods. Based on the results of the study, it shows that the BPK's examination of the 2020-2021 financial statements still illustrates the very lack of responsibility of West Sumatra provincial government officials in following up on the recommendations of the West Sumatra provincial BPK. This is due to the lack of active response from local government officials so that there are still many follow-up documents that have not been completed and the lack of commitment to cooperation between BPK officials and local government officials authorized to complete BPK recommendations. Sanctions given to local government officials who do not follow up on the recommendations of the BPK Under Law No. 15 of 2004 are subject to administrative sanctions and criminal sanctions in the form of a written reprimand, dismissal with respect, postponement of promotion for 1 year and postponement of salary increase for 1 year and can be sentenced to imprisonment for a maximum of 1 (one) year 6 (six) months and / or a fine of at most Rp500, 000, 000.00 (five hundred million rupiah) if not carrying out obligations for the sake of smooth examination of state financial management and responsibility.

Keywords : *Accountability, Local Government Officials, Follow-Up, Recommendations*